

## **BAB I**

### **A. Alasan Pemilihan Judul**

Sekripsi ini dimaksudkan untuk membahas tentang politik pemerintahan Indonesia dalam perdagangan karet ke Argentina dengan salah satu BUMN PTPN IX. Berdasarkan ruang lingkup ekonomi, Indonesia dan Argentina mempunyai peluang kerjasama yang dapat menguntungkan keduanya (simbiosis mutualisme). Dimana Negara Argentina mampu mengelola suatu barang mentah menjadi barang jadi atau pakai tetapi tidak mempunyai sumber daya alamnya, sedangkan Indonesia mempunyai banyak sumber daya alam tetapi belum bisa mengelola secara maksimal. Dua unsur yang saling membutuhkan ini bila bersatu bisa menjadi kekuatan ekonomi yang kuat, dimana keduanya saling melengkapi.

Di dalam ilmu hubungan internasional ternyata tidak hanya berfokus di dalam masalah perpolitikan, ternyata hubungan internasional juga mempelajari kerjasama suatu Negara dengan Negara lain untuk mencapai suatu tujuan atau mendapatkan suatu keuntungan dari Negara lain. Salah satu cabang ilmu dari hubungan internasional yang mempelajari hubungan satu Negara dengan Negara lain adalah ekonomi politik.

Dan Ekonomi politik itu sendiri adalah bagaimana Negara dan proses politik yang terkait didalamnya mempengaruhi produksi dan distribusi kekayaan, bagaimana keputusan – keputusan politik dan kepentingan – kepentingan yang ada

mempengaruhi lokasi aktifitas ekonomi tersebut, dan dengan cara apa sebaliknya, serta bagaimana kekuatan – kekuatan ekonomi mempengaruhi penyebaran kekuasaan dan kemakmuran diantara actor – actor politik dan diantaranya Negara – Negara. Akhirnya bagaimana kekuatan – kekuatan ekonomi tersebut mengubah distribusi politik dan militer pada peringkat internasional.<sup>1</sup>

Tetapi untuk menembus pasaran internasional ternyata tidak semudah membalikkan telapak tangan, dimana banyak kendala yang mesti di hadapinya, salah satunya factor politik ikut andil dalam mempengaruhinya. Sekurang – kurangnya terdapat tiga unsur paling penting dalam proses hubungan timbal balik yang berlangsung, yakni cara dimana factor politik mempengaruhi hasil ekonomi, yakni:

1. System politik membentuk system ekonomi, karena setruktur dan kerja system ekonomi internasional (dalam arti yang luas) ditentukan pula oleh struktur dan kerja system politik Internasional.
2. Pandangan – pandangan politik seringkali membentuk kebijakan ekonomi, oleh sebab kebijakan ekonomi pada umumnya didikte oleh kepentingan – kepentingan politik.
3. Hubungan ekonomi Internasional itu sendiri merupakan hubungan politik, karena interaksi ekonomi Internasional, merupakan proses dimana actor Negara dan bukan Negara melakukan / mengalami :

- a. Mengatasi konflik atau kegagalan mengatasi konflik
- b. Bekerja sama atau mengalami kegagalan dalam mencapai tujuan bersama.

Alasan – alasan tadi menimbulkan suatu ketertarikan tersendiri bagi penulis untuk dapat meneliti strategi apakah yang digunakan PTPN IX dalam usahanya menembus pasar Argentina sebagai Negara tujuan pemasaran. Dengan pertimbangan tersebut, maka penulis tertarik mengangkat tema tersebut dengan judul : “ *Politik Pemerintah Indonesia Dalam Perdagangan Karet (study kasus PTPN IX Ekspor Karet ke Argentina)* ”

#### **B. Tujuan penelitian**

Tujuan Penulisan ini adalah :

1. Penulisan ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah dengan teori yang relevan dan membuktikan hipotesa dengan fakta dan data.
2. Penulisan ini dimaksudkan sebagai manifestasi dari penerapan teori – teori yang penulis dapatkan selama duduk di bangku kuliah
3. Penulisan ini merupakan satu syarat memperoleh gelar sarjana S- 1 pada jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

### **C. Latar Belakang Masalah**

Dalam Era globalisasi dan liberalism perdagangan telah mewarnai pasar saat ini. Berbagai perubahan telah, sedang, dan bakal terjadi bahkan dapat dikatakan bahwa tidak ada yang berubah, kecuali perubahan itu sendiri. Adanya kemajuan yang terjadi di berbagai bidang, seperti ilmu pengetahuan, telekomunikasi, teknologi informasi, jaringan transportasi, dan sector – sector kehidupan lainnya menyebabkan produk – produk yang berasal dari belahan Negara lain dapat masuk kedalam wilayah Negara lain.

Dengan pemberlakuan perdagangan bebas WTO, Indonesia dihadapkan pada tantangan ekonomi yang sangat serius. Berbagai pengurangan dan bahkan penghapusan hambatan perdagangan internasional yang kini mulai diberlakukan akan menghadapkan para pelaku bisnis Indonesia bersaing secara ketat menghadapi pelaku – pelaku bisnis dari Negara – Negara lain. Indonesia dengan ekonomi terbuka, dimana ekspor non migas merupakan salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi internasional dan penciptaan lapangan kerja dan dituntut untuk lebih siap agar dapat mengambil manfaat yang sebesar – besarnya dari peluang yang di hasilkan oleh WTO, hanya dapat di peroleh apabila kita menguasai semua persetujuan WTO dan menerapkan sesuai dengan kepentingan nasional.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Djuma M Anwar. di, *Diklat I, Perdagangan Internasional*, Fisipol UMY, Yogyakarta, hal 5

Dalam era perdagangan bebas, kini harus mengangkat sesuatu menjadi terbaik salah satu dari BUMN (Badan Usaha Milik Pemerintah) adalah PTP (perseroan Terbatas Perkebunan) Nusantara IX. Industri dan perdagangan produk perkebunan merupakan salah satu yang paling dinamis selama periode tahun 2006. Berbagai faktor lingkungan strategis dan isu, baik yang berkaitan dengan faktor eksternal, seperti perdagangan internasional, maupun faktor internal, seperti kebijakan di dalam negeri, telah membuat subsektor perkebunan berkembang demikian dinamis. Bahkan banyak yang meyakini bahwa tahun 2006 subsektor perkebunan kembali meraih predikat primadona, baik dari sisi kinerja maupun perhatian media masa.

Negara – Negara yang menjadi tujuan ekspor karet baik masih mentah maupun setengah matang adalah Cina, Korea, Jepang, Malaysia, Canada, Swedia, dan lain – lain. Terutama ekspor karet terbesar adalah ke Negara Argentina. Karena di Negara inilah kebutuhan akan bahan mentah karet sangatlah besar, jadi peluang bersaing dengan karet local Negara tersebut sangatlah minim dan kalau bisa di kata bahkan hampir tidak ada saingan di sana.

Proses alur barang produksi masuk kedalam wilayah Argentina tentunya tidak luput dari beberapa factor yang harus di perhatikan, meliputi :

1. Kondisi pasaran di Negara tersebut.
2. Tingkat kebutuhan barang di Negara tersebut.
3. Mutu atau kualitas barang yang akan di ekspor ke Negara tersebut.

#### 4. Tingkat harga barang yang menguntungkan.

Perekonomian suatu Negara meliputi sumber mata pencaharian domestic dan alokasi sumber daya. Karena tidak semua perekonomian dunia berjalan pada tingkat efisiensi yang sama, maka sangatlah penting untuk meneliti dengan jelas situasi ekonomi Negara tuan rumah (host country) tertentu guna mengambil keputusan pemasaran yang tepat.<sup>3</sup>

Upaya pemasaran yang berlangsung di Negara tujuan ekspor tentunya tak luput dari kerjasama PTPN IX karet dengan perusahaan atau perkebunan setempat guna memaksimalkan perdagangan. Sikap kooperatif sangat di perlakukan mengingat bahwa suatu sasaran tertentu tidak dapat di capai dengan hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Disini PTPN IX Karet bekerjasama dengan perkebunan tea, coklat (cacao), dan kopi. Dalam hal ini PTPN IX dituntut untuk dapat memilih dengan seksama siapakah yang akan dijadikan rekanan setrategis, yang pada akhirnya kerjasama akan dilakukan oleh dua atau lebih perusahaan yang bekerjasama dalam periode yang sama. Kola borasi tersebut dinamakan aliansi strategis.

Perkembangan dunia bisnis saat ini, mengharuskan Pemerintah dan PTPN IX untuk membentuk Corporate Secretary yang berfungsi menjembatani kepentingan stakeholders dengan perusahaan. Dalam bisnis global juga harus menghadapi kenyataan bahwa dunia ini penuh dengan hambatan tariff, kuota, dan hambatan non

tariff lainnya yang dirancang untuk melindungi pasar suatu Negara dari gangguan maupun penetrasi oleh perusahaan – perusahaan asing meskipun General Agreement on tariffs and Trade (GATT) telah berusaha menurunkan tariff secara efektif, banyak Negara yang masih memberlakukan proteksi. Umumnya hambatan hukum legal (legal barriers), hambatan pertukaran (exchange barriers), dan hambatan psikologis (psychological barriers). Pada dasarnya ada dua tipe hambatan tariff dan hambatan non tariff. Hambatan tariff merupakan pajak yang dibebankan oleh pemerintah atas barang yang masuk ke negaranya, sedangkan hambatan non tariff meliputi kuota, pajak equalisasi impor, administrasi tindakan – tindakan anti dumping, pengendalian devisa, dan berbagai jenis lainnya.

Dengan di terbitkannya undang – undang no 7 tahun 1994 tanggal 2 November 1994 tentang pengesahan atau ratifikasi “*Agreement Estabilishing The World Organization*”. Maka Indonesia secara resmi telah menjadi anggota WTO berarti terikat adanya hak dan kewajiban. Di samping itu WTO bukan hanya menciptakan peluang, tetapi juga ancaman.<sup>4</sup> Bagi Negara yang telah siap dengan globalisasi, maka semua hasil perundingan akses pasar akan menjadi peluang besar. Argentina merupakan peluang untuk melakukan kerjasama, karena Negara ini salah satu dari Negara maju dan siap dengan adanya Globalisasi.

---

<sup>4</sup> Anwar M. Djumadi, log.. cit

Meskipun demikian tidak berarti hambatan – hambatan perdagangan ke Argentina dapat di hapus, mereka tetap ingin melindungi konsumen dan menerapkan perdagangan bebas pada tahun 2008 ini. Hambatan – hambatan perdagangan yang ada, baik tariff maupun non tariff sangat mempengaruhi proses pemasaran Karet PTPN IX, dan harus bersaing dengan prosedur – prosedur besar yang juga memasarkan produk di Negara ini, namun hal ini tidak membuat perusahaan ini menjadi mundur bahkan hal ini dijadikan tantangan bagi perusahaan untuk mengeruk keuntungan yang lebih besar dari kesempatan yang ada.

Dan salah satu yang menjadi isu yang merisauka adalah keefektifan pajak ekspor alam mempercepat pengembangan industry hilir perkebunan karena menaikkan PE (Pajak Ekspor) untuk mempercepat pengembangan industry hilir perkebunan bukanlah merupakan pilihan kebijakan yang efektif. Kenaikkan PE ternyata tidak cukup efektif untuk membendung ekspor karena ekspor relative tidak elastic terhadap perubahan PE. Oleh sebab itu kebijakan menaikkan PE untuk mempercepat pertumbuhan hilir perkebunan bukanlah merupakan prioritas utama.

Industri hulu perkebunan atau subsektor perkebunan merupakan salah satu subsektor yang tumbuh secara konsisten, baik ketika ekonomi nasional dalam keadaan tumbuh normal maupun ketika mengalami krisis. Pada saat kondisi ekonomi secara nasional normal, PDB subsektor perkebunan tumbuh diatas 5% per tahun. Pada saat ekonomi mengalami krisis seperti tahun 1988 dimana ekonomi nasional



tahun 2005, dengan luas areal sekitar 16.5 juta ha, subsektor perkebunan menyediakan lapangan kerja sekitar 12 juta jiwa dan nilai ekspor antara US\$ 4- 5 juta per tahun.

Dibalik perkembangan pesat industri hulunya, industri hilir perkebunan tidak berkembang seperti yang diharapkan, baik dari sisi volume maupun diversifikasi produk. Hal ini tercermin dari penggunaan bahan baku perkebunan untuk industri hilir relatif kecil, berkisar antara 10% -30% dari total produksi. Beberapa industri hilir perkebunan yang berbasis karet bahkan mengalami kemunduran seperti diindikasikan oleh penutupan beberapa pabrik industri hilir karet. Diversifikasi produk juga masih sangat sempit dibandingkan dengan potensi kemungkinan industri hilir yang dapat dikembangkan. Sebagai contoh, lebih dari 76% penggunaan CPO oleh industri digunakan hanya untuk industri minyak goreng. Untuk karet, industri hanya terfokus pada industri ban, sedangkan kakao terfokus hanya pada cocoa butter .

Jika kondisi industri hilir tidak dapat berkembang, paling tidak ada tiga dampak negatif atau economic loss sebagai akibat dari kelambatan pengembangan industri hilir CPO. Dampak negatif pertama adalah bahwa nilai tambah yang bersumber dari industri hilir perkebunan sebagian besar dinikmati oleh negara lain yang mengembangkan industri hilirnya. Dampak negatif kedua adalah negara kehilangan peluang untuk memperoleh tambahan penerimaan dalam bentuk pajak dan kehilangan kesempatan untuk membuka lapangan kerja yang lebih luas. Ketiga, ekspor dalam bentuk bahan baku akan sangat rentan terhadap fluktuasi harga (risiko

harga) karena harganya sangat fluktuatif dengan keefisien keragaman harga tahunan diatas 30%.

Menyadari dampak negatif tersebut dan perubahan yang terjadi di pasar internasional seperti kenaikan harga minyak bumi, pemerintah berusaha mendorong perkembangan industri hilir berbasis perkebunan dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif. Salah satu kebijakan yang menjadi isu atau wacana adalah untuk menaikkan pajak ekspor (PE) produk primer perkebunan dengan harapan ketersediaan bahan baku lebih terjamin dengan harga yang lebih murah. Isu kebijakan yang muncul adalah apakah kebijakan ini efektif untuk mempercepat pengembangan industri hilir perkebunan.

Dampak Kenaikan Pajak Ekspor Perkebunan sebelum isu kebijakan tersebut diwujudkan dalam bentuk kebijakan, potensi dampak positif dan negatif serta efektivitas kebijakan tersebut terlebih dahulu perlu dianalisis sehingga kebijakan tersebut memiliki landasan pemikiran yang logis dan langkah antisipatif dapat dipersiapkan secara lebih baik. Tabel 1. berikut dapat memberi gambaran umum dari dampak penerapan tiga skenario pajak ekspor yaitu 3%, 5%, and 7%. Dengan menggunakan kasus empat ekspor produk ekspor perkebunan utama (karet, CPO, kakao, dan kopi), kenaikan pajak ekspor akan berdampak negatif pada industri hulunya yang dicerminkan oleh penurunan harga tingkat produsen/petani, areal, produksi, dan pendapatan petani. Sebaliknya, industri hilir memperoleh beberapa

manfaat seperti ketersediaan bahan baku yang lebih banyak dengan harga yang lebih rendah.

Penurunan areal sebagai akibat kenaikan PE tersebut selanjutnya menjadikan produksi menurun sebagai akibat penurunan areal dan produktivitas. Dengan PE 5%, produksi perkebunan akan menurun rata-rata dengan 2.08%. Penurunan terendah terjadi untuk tanaman karet dengan penurunan 0.65% dan kopi mengalami penurunan tertinggi yaitu sekitar 3.65%.

Resultan dampak negatif dari kenaikan PE adalah adalah pada pendapatan petani dalam bentuk penurunan gross margin (penerimaan kotor) sebagai akibat penurunan harga dan produktivitas. Kenaikan PE menjadi 5% akan membuat gross margin pekebun menurun antara 3.25% - 7.25%. Secara nominal, penurunan gross margin berkisar antara Rp 400 ribu – Rp 890 ribu per ha per tahun, bergantung komoditi, atau dengan penurunan gross margin rata-rata Rp 640 ribu per ha per tahun. Dampak positif dari kebijakan dalam bentuk penurunan harga produk perkebunan di pasar domestik, membuat harga produk hilirnya menjadi menurun. Sebagai contoh, penerapan PE sebesar 5% akan menyebabkan penurunan harga minyak goreng sebesar 2.03%. Penurunan harga minyak goreng sebagai salah satu kebutuhan pokok tentu akan mempunyai nilai strategis baik secara ekonomi, sosial, dan politik.

Informasi mengenai besar serta distribusi dampak perdagangan bebas terhadap perkembangan komoditas Indonesia merupakan informasi penting dalam penyusunan kebijakan komoditas perkebunan. Jika liberalisasi perdagangan member dampak positif terhadap komoditi tertentu, maka posisi Indonesia dalam negosiasi atau perundingan adalah mendorong upaya-upaya penerapan komitmen-komitmen tersebut. Hal ini antara lain dapat dilakukan dengan melaksanakan segera komitmen-komitmen Indonesia yang berkaitan dengan komoditas tersebut. Dengan demikian, Indonesia mempunyai *bargaining position* yang lebih kuat untuk mendesak negara lain untuk segera melaksanakan komitmennya.

Liberalisasi perdangan diperkirakan akan menambah atau mempunyai dampak yang signifikan terhadap perkembangan komoditas perkebunan. Besarnya dampak untuk masing-masing komoditas perkebunan tentunya bervariasi tergantung besarnya intervensi pemerintah negara-negara yang terlibat dalam perdagangan komoditas perkebunan. Sebagai contoh, dampak liberalisasi terhadap minyak nabati, di mana CPO termasuk di dalamnya, diperkirakan akan lebih besar terhadap karet yang relatif tidak banyak mengalami intervensi pemerintah.

Sejalan dengan pentingnya informasi tersebut, maka pada tulisan ini akan diuraikan mengenai esensi dari liberalisasi perdagangan dan dampaknya terhadap komoditas perkebunan. Uraian mengenai esensi liberalisasi perdagangan , khususnya komitmen-komitmen yang berkaitan dengan perdagangan PU,

dimaksudkan untuk memberi gambaran yang lebih jelas mengenai makna liberalisasi perdagangan yang sering diterjemahkan sebagai “perdagangan yang bebas”. Pada bagian selanjutnya, bahasan difokuskan pada dampak secara umum dari liberalisasi perdagangan terhadap industri perkebunan.

Sementara keadaan karet di Argentina itu sendiri semakin terpuruk di tambah lagi dengan perluasan NAFTA, serta faktor geografis juga berpengaruh bagi kelangsungan produksi karet, karena tingkat curah hujan yang kurang, mengakibatkan getah karet yang dihasilkannya berkuakitas rendah, dan seriap pohon karet sangan sedikit menghasilkan getah karet.

Di Argentina faktor sejarah juga berpengaruh bagi kebijakan pemerintah dalam perdagangan internasional dalam bidang karet terutama dalam sejarahnya adalah kebangkitan nasionalisme pasca Che Guevara Gerakan tani pendukung PT adalah Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra atau MST (Gerakan Pekerja Pedesaan Tak Bertanah), organisasi kiri yang paling keras memperjuangkan reformasi agraria di Brazil (Rotella 1997; Wolford 2005). Sebelumnya, di kawasan Amazon cabang-cabang PT sudah merangkul para petani penyadap karet (seringalistas), termasuk tokoh penyadap karet (seringal ), Francisco “Chico” Alves Mendes Filho, yang akrab dipanggil Chico Mendes, yang ikut mendirikan cabang PT di Acre, kampung halamannya. Kesuksesannya memimpin gerakan penyadap karet, yang berkepentingan atas pelestarian hutan Amazon, membawa Chico Mendes ke

pentas internasional, lewat muhibah-muhibah bersama para aktivis lingkungan ke pusat-pusat ekonomi dunia di Britania Raya dan AS. Di Washington, DC, ia memprotes pembangunan jalan raya dan proyek-proyek lain oleh pemerintah Brazil dengan hutang dari Bank Dunia. Ketenaran Chico Mendes sebagai “pahlawan pembela lingkungan Amazon” ini meningkatkan kebencian dan kemarahan para rancheiros, pemilik-pemilik peternakan besar di kawasan Amazon kepadanya. Pada malam tanggal 22 Desember 1988, tiga hari sebelum Natal, Chico Mendes ditembak mati oleh pembunuh-pembunuh bayaran keluarga Darly Alves da Silva, tuan tanah dan raja ternak di daerah itu (Revkin 1990). Dan kemenangan Lula agak mengobati kesedihan akibat kematian Chico Mendes dan banyak penyadap karet lain, serta 19 pekerja pedesaan yang dibunuh polisi militer Brazil tahun 1996.

#### **D. Pokok Masalah**

Dilatar belakangi masalah yang di uraikan di atas beserta alasan – alasannya, maka penulis merumuskan bahwa pokok permasalahan yang menjadi pertanyaan adalah : Bagaimana peran pemerintah Indonesia dalam menangani masalah perdagangan karet ke Argentina di era globalisasi ini?

#### **E. Kerangka Teori**

##### **1. Perdagangan Bebas**

Perdagangan bebas sebagai salah satu kerangka acuan dalam penulisan ini. Dalam kamus hubungan internasional diungkapkan bahwa perdagangan bebas adalah:

The flow of trade baseds on supply and demand, free from government regulations, control, and promotional activities.<sup>5</sup>

Arus perdagangan yang didasarkan atas penawaran dan permintaan, terlepas dari peraturan, pengadilan dan usaha – usaha promosi pemerintah.

Pemikiran perdagangan bebas ini berawal dari konsep ekonomi liberal yang yang di pelopori oleh David Ricardo dan Adam Smith sebagai kritikal terhadap nasionalisme.<sup>6</sup> mereka menentang pengendalian ekonomi domestic dan internasional yang berlebihan. Perspektif liberal mengajukan argument bahwa cara paling efektif untuk meningkatkan kekayaan nasional adalah justru dengan membiarkan pertukaran antar individu dalam ekonomi domestic dan internasional berjalan secara bebas dan tidak usah dibatasi. Dengan kata lain mereka mengabnjurkan pasar bebas.

Perdagangan bebas adalah perdagangan yang dilakukan antar suatu Negara dengan Negara lain atau satu kelompok Negara dangan Negara lain dengan menghilangkan berbagai hambatan perdagangan dengan tujuan untuk menciptakan persaingan bebas antar negarayang terlibat didalamnya. Opersaingan bebas tersebut untuk merangsang pembagian kerja antar Negara yang terlibat guna meningkatkan produktifitas dan efisiensi serta menurunkan biaya produksi. Idealism ini mendasarkan kepada anggapan bahwa masing – masing Negara melakukan spesialisasi dengan dasar keunggulan komperatif (*comparative advantage*).

---

<sup>5</sup> Samodra Wibawa, kebijakan BUMN Menghadai Liberalisasui, *prospektif*, vol 7. No 1, PPSK, Yogyakarta 1995, hal 80

<sup>6</sup> C. plano and Rov Olton. *the international relation dictuionary*. clio press Ltd, England. hal 127

Konsepsi liberal Ricardian – Smithian ini didasarkan pada gagasan mengenai kedaulatan pasar dalam proses ekonomi dan mengasumsikan adanya keselarasan kepentingan secara alamiah diantara berbagai manusia dan bangsa. Selanjutnya kaum liberal berasumsi bahwa individu (yaitu konsumen, perusahaan atau wiraswasta individual) adalah actor utama dan mereka berperilaku rasional dan selalu memaksimalkan perolehan. Tindakan rasional adalah tindakan yang didasarkan atas kalkulasi berbagai pilihan kemungkinan.

Berhubungan dengan adanya persamaan yang mendasarkan antara kepentingan nasional dengan kepentingan ekonomi internasional, yaitu kepentingan pasar bebas, kaum liberal mengajukan argumen bahwa sebaiknya Negara jangan mencampuri transaksi ekonomi yang melintasi batas nasional. Melalui pembebasan pertukaran komoditi, penghapusan hambatan bagi arus intervensi, dan penciptaan pembagian kerja secara internasional, setiap orang dalam jangka panjang akan memperoleh keuntungan. Ini bisa terjadi karena kebijakan liberalisasi itu akan mendorong tercapainya tujuan pokok ekonomi, yaitu pemanfaatan sumber daya dunia yang langka secara optimal atau memaksimalkan kesejahteraan dunia. Karena itu kaum liberalism percaya bahwa demi memenuhi kepentingan nasional sendiri, setiap bangsa harus bersikap terbuka dan kooperatif dalam hubungan ekonomi dengan negara lain.



Pasar bebas merupakan salah satu ciri dari system ekonomi liberal.<sup>7</sup> Ciri system ekonomi liberal lainnya adalah:

1. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak milik
2. Penyerahan proses alokasi sumber daya kepada mekanisme pasar bebas. Artinya keputusan produksi, harga, dan kesempatan kerja ditentukan oleh mekanisme penawaran dan permintaan.
3. Penghargaan pada persaingan bebas yang jujur dan adil diantaranya pelaku ekonomi.
4. Pembatasan terhadap peranan pemerintah terutama hanya pada perlindungan hokum, terhadap hak milik, pembangunan prasarana ekonomi dan pencegahan terhadap hal – hal yang bias merusak mekanisme pasar dan persaingan bebas.

Kata perdagangan bebas menjadi sangat populer dalam wacanan tentang pembangunan ekonomi di Indonesia karena kata ini mengandung makna ganda. Di satu pihak mempunyai makna sebuah kesepakatan bagi Indonesia untuk memperluas pasar bagi produk – produk Indonesia. Dalam era perdagangan, pasar internasional terbuka lebar bagi siapa saja yang ingin menjual barangnya di pasar tersebut. Globalisasi menjadi dunia “tanpa batas” yang semula tertutup oleh nasionalisme ekonomi yang tercermin dalam sikap proteksionalisme dari setiap Negara yang

---

<sup>7</sup> Dawarn Raharjo, *jurnal ekonomi pembangunan*, vol 8, FE UII, Yogyakarta, 1996 hal 36

berupaya melindungi pasar dalam negeri mereka dari penetrasi produk – produk asing.

Makna kedua dari perdagangan bebas adalah keharusan Indonesia untuk memasuki era persaingan bebas. Apabila Indonesia mendapat kesempatan untuk menjual produk dan jasa secara bebas di pasar internasional, maka sebaliknya Indonesia harus membuka lebar – lebar pasar di dalam negeri bagi masuknya produk dan jasa dari Negara asing.

## **2. Konsep Kerjasama Internasional**

Berkaitan dengan pengertian kerjasama internasional, Dr. Budiono Kusumohamidjojo mengatakan : “ sikap kooperatif dalam menyelenggarakan politik luar negeri senantiasa dikendalikan kepada asumsi bahwa persoalan tidak dapat di atasi, atau sasaran tertentu dapat di capai dengan hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Sikap kooperatif juga dapat bangkit bila ada perkiraan bahwa kerjasama akan membawa dampak yang menguntungkan bila dibandingkan dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Tetapi pada umumnya juga didasari bahwa kerjasama internasional senantiasa membawa konsekuensi tertentu. Namun demikian suatu kerjasama senantiasa diusahakan justru karena manfaat yang diperoleh secara proposional adalah masih lebih besar daripada konsekuensi yang harus di tanggung”.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Kusumohamidjojo Budiono, *Hubungan Internasional: Kerangka Studi Analisis* Alumni Bandung

Politik Pemerintahan Indonesia dalam melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dengan cara menyeleksi calon rekan atau partner kerja atau mitra setrategis yang dapat diandalkan dalam kerjasama. Seperti kerjasama perkebunan kopi, coklat (cocona), kelapa sawi, dan tea, yang dimana mereka bergabung menjadi 1 (satu) atap dengan PTPN IX, dimana sebelumnya perkebunan gula juga bergabung menjadi satu atap, tetapi keluar dari PTPN IX karena dianggap merugikan perusahaan. Dalam kerjasama menyangkut pada dimensi inti yang saling berkaitan, yaitu?

1. Keselarasan tujuan : tujuan kedua belah pihak cocok satu sama lain sebatas tujuan aliansi maupun tujuan kedua belah pihak dapat tercapai.
2. Keunggulan setrategis : harus terdapat manfaat yang di rasakan kedua belah pihak.
3. Saling ketergantungan : setiap mitra tergantung satu sama lain dan hubungan ini harus dikelola sehingga konflik dibatasi seminimal mungkin, sedangkan kerjasama berjaklan dengan baik.
4. Komitmen : kepercayaan adalah krusial bagi kelangsungan hidup jangka panjang sebuah aliansi dan vital bagi kelangsungan itikad relation yang mendasari komitmen diantara mitra – mitra aliansi.<sup>9</sup>

Apabila salah satu dari dimensi ini tidak ada, maka berbagai masalah biasa mengemukakan dan dapat menjadi konflik. Apabila konflik yang tidak diinginkan tidak timbul maka setiap perusahaan yang berniat melakukan kerjasama. Disamping itu kerjasama kerugian yang ada tidak sebanding dengan keuntungan yang akan diraih pada akhirnya. Dan kerjasama ini tidak hanya bekerjasama dengan rekan (perusahaan) di dalam negeri saja tetapi juga dengan perusahaan atau pendukung lainnya di Negara Argentina.

### **3. Konsep Aliansi Strategis**

Bisnis Internasional dapat dilakukan dalam banyak cara. Perusahaan – perusahaan yang benar – benar berpengalaman dengan orientasi global penuh dengan menggunakan sebagian bentuk operasional yang ada, menyeleksiya menurut produk tertentu atau karakteristik operasi asing. Banyak dari bentuk tersebut yang melibatkan kolaborasi dengan perusahaan lain. Pada waktu kolaborasi ini mempunyai arti strategis bagi satu atau lebih perusahaan yang terlibat, kolaborasi itu dinamakan aliansi setrategis.

*Alliancy Strategy* atau setrategi kerjasama adalah kerjasama yang dilakukan oleh pengusaha yang bekerjasama dalam periode yang sama. Salah satu cirri khas dari aliansi strategis adalah, bahwa antara partner dalam rangka kerjasama itu menjamin akses kepada potensi persaingan yang relevan. Jadi dapat direalisasikan bersama – sama kelebihan – kelebihan persaingan relevan yang strategis dan dengan demikian

dijamin potensi keberhasilan bidang usaha masing – masing. Kerjasama yang dimaksud dalam aliansi strategis dapat dilihat sebagai bentuk yang berorientasi fungsi secara organisatoris dari aliansi strategi tersebut. Bentuk – bentuk aliansi strategis dapat diurutkan sesuai dengan kekuatan ikatannya yang semakin meningkat, yaitu pertama perjanjian kerjasama, kedua *franchise* dan *lisensi*, ketiga perjanjian *original equipment manufaktur (oem)*, keempat akuisisi, kelima *join-venture*, dan keenam *cross sharing*.

Di bawah ini adalah sepuluh pertimbangan untuk menciptakan suatu strategi kerjasama:

1. Penawaran kepada pelanggan merupakan variasi jasa atau produk yang lebih besar. Hal ini mempermudah dalam pembelanjaan yang hemat waktu produksi untuk penjualan.
2. Peningkatan jumlah penjualan yang akan meningkat disebabkan pengkombinasian dengan bisnis yang lain, penghematan uang dan waktu yang digunakan dalam merekrut karyawan baru.
3. Pemasaran dan anggaran periklanan akan bertambah. Ketika terbentuk suatu persekutuan strategis dengan bisnis lain yang kedua – duanya membutuhkan promosi dan pemasaran.
4. Penawaran kepada pelanggan dapat dilakukan berulang – ulang dari produk yang sama yang ditunjukkan untuk peningkatan produk.

5. Kegiatan ini ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar, jumlah orang – orang terampil yang bekerja pada kegiatan yang sama, yang akan memperoleh pengetahuan dari rekanan bisnis.
6. Mampu berkompetisi dengan penjual lain dalam memcapai suatu target yang lebih besar, juga untuk meningkatkan jumlah total pelanggan yang ada dalam penjualan menjual produk dan jasa.
7. Kerjasama dengan mitra kerja, yang akan menambah kredibilitas perdagangan yang lebih berpotensi lebih menguntungkan dari kepercayaan para pelanggan.
8. Memperluas jaringan yang lebih cepat, mengembangkan produksi yang baru dan jasa yang lebih cepat dengan kekuatan pekerjaan yang lebih besar.
9. Pemecah permasalahan dengan pelanggan yang lebih besar, juga untuk meningkatkan layanan kepada pelanggan dari mitra yang bekerja sama.
10. Mengenal lebih baik “pemikiran strategis” hal ini ditujukan untuk perdagangan dengan gagasan yang lebih cepat menguntungkan dari sebelumnya.

Tujuan fundamental dari sebuah aliansi strategis internasional adalah meningkatkan daya saing jangka panjang mitra – mitra strategisnya. Aliansi bukanlah

sekedar perjanjian. Aliansi merupakan system dan hidup yang bertumbuh secara progresif dalam kemungkinan – kemungkinan. Di luar sebab – sebab langsung pembentukan aliansi strayegis, hubungan bisnis tersebut menawarkan kepada pihak – pihak yang terlibat suatu opsi masa depan, membuka pintu baru dan peluang yang tidak teramalkan sebelumnya.

Aliansi yang dianggap berhasil bagi kedua belah pihak melibatkan kolaborasi daripada sekedar pertukaran belaka. Mitra – mitra menghargai keahlian – keahlian yang dibawa masuk ke dalam aliansi oleh masing – masing. Aliansi tidak dapat dikendalikan oleh system formal, tetapi menuntut suatu koneksi antar pribadi yang sangat kental dan prasarana internal yang memperkaya proses belajar.

Kemajuan dalam bidang telekomunikasi, komputerisasi, dan transportasi telah mempermudah PTPN IX dalam memasuki pasar Argentina. Memandang dari sekala ekonomis dan lingkup distribusi serta pemasaran memberikan manfaat kepada perusahaan – perusahaan yang secara agresif dan cepat memasuki berbagai pasar. Namun biaya untuk melakukan hal ini kerap kali besar di luar jangkauan perusahaan. Aliansi strategis memungkinkan perusahaan meraih manfaat dari gerak masuk cepat seraya mempertahankan biaya rendah.

#### **F. Hipotesa**

Berdasarkan konsep yang telah dipaparkan di atas, maka hipotesa yang di ambil adalah : “Politik Pemerintah Indonesia Dalam Perdagangan Karet ke Argentin

2006”adalah dengan melakukan kerjasama internasional dengan mitra strategis di Argentina dan dengan pihak – pihak terkait di Negara tersebut, seperti pemerintah Argentina dan meningkatkan kualitas produk barang, Dengan indicator – indicator sebagai berikut:

1. Ikut serta dalam ITRCo.
2. Membentuk GAPKINDO.
3. Ikut serta di dalam NTRC.

#### **G. Jangkauan Penelitian**

Pembatasan penelitian sangat diperlukan agar tidak timbulnya keracuan penelitian dan kekaburan penelitian dan kekaburan wilayah persoalan. Dalam mempermudah penulisan, pembahasan mengenai ekspor karet PTPN IX yang jangkauan waktunya di ambil pada tahun 2006. Dimana pada tahun itu perkebunan merupakan primadona bagi investor – investor dan peningkatan dalam pemasaran ke luar negeri. Meskipun demikian tidak menutup data – data sebelum atau sesudah jangkauan yang mendukung penelitian, dan terfokus pada kerjasama Indonesian dengan Argentina dalam hal perdagangan Karet.

#### **H. Metode dan Teknik Penelitian**

Penelitian merupakan suatu proses yang panjang dan berawal dari minat untuk mengetahui fenomena-fenomena tertentu dan selanjutnya berkembang menjadi



gagasan, teori, konseptualisasi, pemilihan metode yang sesuai dan seterusnya.<sup>10</sup> Jadi, hal yang sangat penting bagi seorang peneliti adalah adanya minat untuk meneliti masalah sosial atau fenomena sosial tertentu. Minat tersebut dapat berkembang karena rangsangan bacaan, diskusi, seminar, atau pengamatan, atau bahkan campuran dari kesemuanya itu. Titik tolak yang sesungguhnya bukanlah metode penelitian, akan tetapi kepekaan dan minat, ditopang oleh akal sehat (*common sense*).<sup>11</sup> Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa berbagai tahap harus ditempuh hingga tercapai hasil penelitian yang memenuhi kaidah-kaidah ilmiah, dan masing-masing tahapan perlu dilaksanakan dengan kritis, cermat dan sistematis.

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah deskripsi analisis. Penelitian deskripsi analisis secara mendalam mengandung pengertian yaitu penelitian yang menggambar suatu persoalan atau permasalahan yang terjadi di masyarakat untuk dicari solusinya secara sistematis dan akurat sesuai dengan fenomena yang diselidiki.

#### 2. Penelitian Kepustakaan

Adalah merupakan upaya pengumpulan data dan teori melalui buku-buku, majalah dan sumber informasi penunjang seperti Koran, kliping,

---

<sup>10</sup> Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survei*. Jakarta, LP3ES, hal. 12.

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 12.

dokumen, agenda, dan hasil penelitian yang didapat dari Dinas perdagangan, dan kantor Induk PTPN IX.

### 3. Dokumentasi

Teknik pengambilan data yang diperoleh melalui arsip, foto-foto, dan lain-lain. Adapun sumber-sumber khususnya berubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

#### I. Sistematika Penulisan.

Dalam penulisan ini, di bagi ke dalam 5 bab, masing – masing bab dapat diuraikan sebagai berikut :

- BAB I Bab ini merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka pemikiran, hipotesa, jangkauan penelitian, metode dan tehnik penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II PTP Nusantara IX menghadapi globalisasi
- BAB III Politik Pemerintah Indonesia dalam perdagangan karet ke Argentina
- BAB IV Politik Pemerintah Indonesia dalam menangani masalah perdagangan karet di Argentina
- BAB V Kesimpulan